

Kebijakan Pemerintah dalam Pemberdayaan Industri Rumah Tangga (Pisang Sale) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” (Studi di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara)

Nurmasyahyati¹⁾, Dicky Armanda²⁾

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional

² Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Dickyarmanda@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Fokus penelitian ini tentang “Kebijakan Pemerintah dalam Peemberdayaan Industri Rumah Tangga untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga” dengan mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan industri rumah tangga (pisang sale) beserta hambataannya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Jenis penelitian yang digunakan termasuk dalam pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan teknik memperoleh data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data ditempuh melalui koleksi data, mereduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan (verifikasi). Adapun Informan yang digunakan sebanyak 11 orang yang ditentukan secara purposif terdiri dari Camat, tokoh masyarakat, geuchik gampong dan pengelola usaha industri rumahtangga di Kecamatan Langkahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberdayakan industri rumah tangga (pisang sale) diwujudkan melalui tindakan pemberian penyadaran, pemberian kapasitas intelektual (sumberdaya manusia) seperti kemampuan, pengetahuan, keterampilan, fasilitasi modal usaha. Permasalahannya bahwa 21 industri rumah tangga di Kecamatan Langkahan menghasilkan pendapatan rata-rata Rp.5.000.000 hingga Rp.7.000.000 perbulan. Namun belum mampu mengembangkan usahanya secara maksimal dan kontinyu, karena pemerintah tidak pernah melakukan pemberdayaan. Kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan industri rumah tangga diwujudkan melalui tindakan pemberian penyadaran, pemberian kapasitas intelektual (sumber daya manusia) seperti pengetahuan, pengetahuan dan keterampilan, fasilitasi modal usaha. Kebijakan tersebut belum terwujud secara efektif, karena masih ada berbagai hambatan seperti rendahnya kesadaran individu, minimnya sumber daya manusia seperti kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, terbatasnya modal kerja, minimnya aktivitas pemasaran serta terbatasnya bahan baku. Disarankan agar pemerintah dapat melakukan tindakan pemberdayaan bagi usaha industri rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan sumber daya manusia, mempermudah akses permodalan, dan memperluas aktivitas pemasaran.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, dan Industri Rumah Tangga

Abstract

The focus of this research is on "Government Policy in Empowering Home Industries to Improve Family Welfare" taking the research location in Tanggaan District, North Aceh Regency. The aim of this research is to describe government policy in empowering home industries (banana sales) and its obstacles in improving family welfare. The type of research used is a descriptive qualitative approach using techniques to obtain data through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are carried out through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions (verification). The informants used were 11 people who were determined purposively, consisting of the sub-district head, community leaders, gampong geuchik and home industry business managers in Tanggaan District. The research

results show that government policy in empowering home industries (banana sales) is realized through actions to provide awareness, provide intellectual capacity (human resources) such as abilities, knowledge, skills, facilitation of business capital. The problem is that 21 home industries in Stepan District generate an average income of IDR 5,000,000 to IDR 7,000,000 per month. However, they have not been able to develop their business optimally and continuously, because the government has never carried out empowerment. The conclusion is that government policy in empowering home industry is realized through actions to provide awareness, provide intellectual capacity (human resources) such as knowledge, know-how and skills, facilitate business capital. This policy has not been realized effectively, because there are still various obstacles such as low individual awareness, minimal human resources such as ability, knowledge and skills, limited working capital, minimal marketing activities and limited raw materials. It is recommended that the government take empowerment actions for home industry businesses, so that they can increase family income, improve human resources, facilitate access to capital, and expand marketing activities.

Keywords: Policy, Government, and Home Industry

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengambil langkah kebijakan penting dan strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui pembinaan industri rumah tangga dalam rangka memberantas kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar mampu hidup secara mandiri, meningkatkan pendapat keluarga sehingga dalam mewujudkan kesejahteraan hidup lahir dan batin, aman dan damai merupakan perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Perhatian Pemerintah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat semakin pada saat ini semakin serius dan sungguh-sungguh, Hal tersebut terbukti bahwa kebijakan pemberian dalam alokasi dana gampong/desa bersumber APBN sejak tahun 2015 ditegaskan bahwa 50% pemanfaatannya diperuntukkan untuk memberdayakan ekonomi (keluarga) masyarakat miskin.

Keluarga sebagai unit terkecil merupakan elemen dasar dalam masyarakat dan mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena kehidupan keluarga menjadi indikator bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya untuk membina keluarga secara langsung dan menjangkau sumber daya perekonomian yang ada dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran aktif segenap warga lapisan masyarakat dalam pembangunan perekonomian harus lebih ditingkatkan, merata dan berkualitas dalam memberantas kemiskinan serta meningkatkan pendapatan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan hidup rumah tangga sehingga mampu hidup secara mandiri, berkualitas dan bermaartabat.

Adapun dalam kehidupan masyarakat berkembang kegiatan usaha yang bertujuan untuk memberdayakan individu-individu agar dapat menjadi warga masyarakat yang bermartabat di tengah masyarakat dan dapat mengarahkan dirinya sendiri menjadi pribadi yang mandiri dan berwawasan luas. agar warga masyarakat mampu bekerja dan berusaha untuk maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat mengharuskan melakukan gerakan perekonomian masyarakat miskin di gampong/desa untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku untuk berusaha secara pribadi, keluarga dan masyarakat agar mampu hidup mandiri secara bermartabat dan berbudaya atas kemampuan diri sendiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong atau desa merupakan benteng kekuatan “kesejahteraan keluarga” yang berperan besar dalam

masyarakat serta dapat membantu perekonomian masyarakat yang miskin dan kurang mampu.

Prinsip pemberdayaan pada dasarnya sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat individu yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Pada sisi lain bahwa pemberdayaan merupakan peningkatan kemandirian masyarakat berdasarkan kapasitas dan kekuatan individu sendiri atas sumber daya baik material maupun non material melalui pemberdayaan industri kecil (rumah tangga). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan lebih mudah dilakukan pada saat individu warga masyarakat dalam keadaan tidak berdaya, tidak mampu menolong diri sendiri, kehilangan kemampuan untuk mengendalikan kehidupan sendiri (Wrihatnolo:2007)

Kenyataan menunjukkan bahwa makin baik pemberdayaan industri rumah tangga maka semakin baik pula kehidupan perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa industri rumah tangga menjadi tolok ukur serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pemerintah perlu memberdayakan dalam rangka membina industri rumah tangga, sehingga individu warga masyarakat mampu hidup secara mandiri serta mampu meningkatkan kehidupan rumah tangganya yang berkualitas dan bermartabat.

Adapun Usaha kecil diartikan sebagai industry rumah tangga yang merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperdagangkan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan dibawah 1 (satu) miliar rupiah yang memiliki 1 sampai 5 pekerja. Sementara Usaha Menengah diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk memproduksi barang untuk diperdagangkan secara komersial dan mempunyai omzet penjualan lebih dari 1 (satu) miliar yang memperkejakan 1 sampai 10 tenaga kerja. (Sumber: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, 2015).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan rumah tangga dalam mendorong kehidupan ekonomi masyarakat miskin, menginsyaratkan agar individu sebagai warga masyarakat di gampong atau pedesaan agar bekerja dan berusaha untuk maju melalui industri rumah tangga, sehingga mampu untuk menumbuhkan kembangkan sikap dan perilaku untuk berusaha secara pribadi, keluarga dan masyarakat agar mampu hidup mandiri secara bermartabat dan berbudaya atas kemampuan diri sendiri.

Hasil observasi yang penulis lakukan menunjukkan bahwa di Kecamatan Langkahan terdapat 23 gampong/desa dengan jumlah penduduk 18.908 jiwa yang diperkirakan 35% sebagai penduduk miskin. Dari 23 gampong/desa tersebut diantaranya 7 desa yang memiliki potensi lebih kurang 21 industri rumah tangga pisang sale, yang dikerjakan (diolah) secara tradisional, yang ternyata sangat mendukung ekonomi keluarga. Langkahan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki sumber daya berbagai jenis pisang, yang dapat diolah menjadi makanan pisang sale.(Sumber: Kecamatan Langkahan, 2018).

Menjadi permasalahan bahwa di Kecamatan Langkahan memiliki lahan pisang yang sangat baik dan luas sebagai bahan baku produksi pisang sale. Namun usaha industri rumah tangga pisang sale di 7 gampong/desa tersebut tidak diberdayakan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Langkahan maupun Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara. Permasalahan lain adalah warga masyarakat yang mengelola industri rumah tangga tidak memiliki modal kerja dan kurang keterampilan (sumber daya manusia), terbatasnya bahan

baku, sehingga industri rumah tangga tersebut dikelola secara tradisional dan tidak mampu berkembang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif. Pertimbangan penulis gunakan jenis penelitian kualitatif karena merupakan suatu pendekatan yang berupaya menafsirkan makna suatu peristiwa sebagai interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Guna untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Moleong, 2005:5). Penelitian ini diselenggarakan di Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara. Pertimbangan memilih lokasi ini karena di Kecamatan Langkahan terdapat 21 industri rumah tangga yang berada di 7 (tujuh) desa yang mengelola industri rumah tangga pisang sale, namun tidak mendapat pembinaan dan pemberdayaan dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan sebanyak 11 informan yang orang diambil dari yang dianggap mampu mewakili dari populasi yang dipilih atas dasar kemampuan yang mewakilinya. Informan ditentukan berdasarkan secara *purposif* yaitu berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh informan itu sendiri, seperti statusnya, jabatannya, tingkat pendidikannya, dan kompetensinya.

Informan yang diambil adalah Camat Langkahan, 5 Geuchik Gampong yang memproduksi industri rumah tangga pisang sale, 3 pengelola industri rumah tangga dan 2 tokoh masyarakat Kecamatan Langkahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Industri Rumah Tangga (Pisang Sale) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu serta pendapat para informan yang menyatakan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan industri rumah tangga pisang sale untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga diwujudkan melalui langkah-langkah yang meliputi pemberian penyadaran keluarga miskin, pemberian atau pembinaan sumber daya manusia seperti pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), pembinaan keterampilan (*skill*), fasilitasi modal kerja (*capitallity*) serta akses pemasaran produksi (*marketing*).

1. Pemberian Penyadaran.

Langkah pemberdayaan pertama adalah pemberian penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan adalah pemberian pencerahan (motivasi) dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu sebagaimana hidup orang lain yang berada. Kepada kelompok keluarga miskin diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan pada mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan. Adapun program yang dapat diberikan pada tahap ini adalah pemberian pengetahuan (kognisi), kepercayaan diri.

2. Pemberian kapasitas Sumber Daya Manusia

Langkah pemberdayaan berikutnya adalah pemberian kapasitas atau dengan bahasa lain adalah memampukan untuk diberikan daya atau kuasa (*capacity Building*) yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu memberdayakan dirinya sendiri agar

dapat hidup secara mandiri dan bermartabat. *Capacity Building* terdiri atas 3 jenis yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok atau keluarga

Pengkapasitasan organisasi dalam arti perhatian masyarakat gampong setempat ikut serta berperan dalam memberantas kemiskinan. Penguapsitan sistim nilai dalam arti memberikan pemahaman dan pencerahan agar individu dalam keluarga atau masyarakat miskin agar tidak hidup malas serta memberikan motivasi agar individu warga masyarakat bahwa melalui industry rumah tangga dapat meningkatkan pendapatan keluarga sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

a. Pemberian Pengetahuan (*knowledge*)

Setelah tumbuhnya kesadaran maka dilakukan pemberian pengetahuan sehingga keluarga miskin memiliki Kemampuan (*ability*). Kebijakan pembinaan dan pemberdayaan kemampuan bermakna memberikan pencerahan bagi keluarga miskin agar tidak hidupmalas dan mampu menberdayakan dirinya sendiri, hidup berkualitas dan bermartabat. Pada aspek ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa keluarga miskin memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Kelompok miskin diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi orang yang berada seperti orang lain dan dapat dilakukan pada keluarga yang mempunyai kapasitas untu keluar dari kemiskinan. Adapun program yang dapat diberikan pada aspek tersebut adalah pemberian pengetahuan (kognisi) dan kepercayaan diri dalam melakukan kegiatanusaya industri rumah tangga.

Aspek tersebut bermakna pengkapasitasan atau memampukan untuk diberikan daya bahwa warga miskin harus mampu terlebih dahulu hidup mandiri, berkualitas dan bermartabat. Pada aspek ini target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki keluarga miskin. Prinsip dasarnya adalah proses pemberiaan kemampuan atau daya diberikan sesuai dengan kecakapan dan keahlian warga miskin.

b. Pemberian Keterampilan (*skill*).

Setelah memiliki pengetahuan dan kemampuan langkah pemberdayaan selanjutnya melakukan pembinaan keterampilan (*skill*) secara makro merupakan kebijakan pembinaan sumber daya manusia bagi pengelola industri rumah tangga yang merupakan gabungan antara aspek pengetahuan (*kognity*) dan kemampuan (*ability*). Secara mikro (khusus) bahwa pengelola industri rumah tangga pisang sale mampu mengelola secara terampil dan bahkan secara tehnologi, tanpa menggunakan cara kerja secara manual.

Aspek keterampilan (*skill*) ini menjadikan hasil industri rumah tangga pisang sale menjadi suatu produksi yang baik dan berkualitas. Dengan demikian industri rumah tangga memiliki prospek yang cerah dimasa mendatang, karena disukai dan digemari oleh masyarakat pembeli.

3. Pemberian Daya (*empowerman*).

Setelah memiliki pengetahuan, kemapuan dan keterampilan maka pemberdayaan selanjutnya adalah diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian daya ini ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki Prinsip dasarnya adalah proses

pemberiaan daya atau kekuasaan modal usaha diberikan sesuai dengan kecakapan dan keahlian penerima.

Aspek Permodalan (*capitality*) merupakan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan industri rumah tangga pisang sale adalah fasilitasi akses permodalan baik dari perbankan, bantuan non bank, hasil keuntungan BUMN 5% bagi pembinaan industri kecil, hibah dan lain sebagainya. Kebijakan ini penting karena tanpa modal kerja, maka usaha industri rumah tangga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Wrihatnolo (2007) yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara langkah yang harus ditempuh melalui tahap penyadaran. Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki sesuatu. Seperti kelompok miskin kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada dan itu dapat dilakukan pada mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan. Adapun program yang dapat diberikan pada tahap ini adalah pemberian pengetahuan (kognisi), kepercayaan diri.

Langkah pengkapasitasan (*capacity Building*) atau dengan bahasa lain adalah memampukan (*enabling*) untuk diberikan daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu. *Capacity Building* terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu manusia, organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok.

Langkah Pemberian Daya, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas atau peluang. Pemberian ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki Prinsip dasarnya adalah proses pemberian daya atau kekuasaan diberikan sesuai dengan kecakapan dan keahlian penerima. Pada tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Tahap pengkapasitasan yaitu tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua (sekunder) menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberdayakan industri rumah tangga (pisang sale) dapat diwujudkan melalui tindakan pemberdayaan yang meliputi pemberian penyadaran, pemberian pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pemberian daya permodalan dan pemasaran. Penulis sependapat dengan informan tersebut, karena dalam kebijakan pemerintah dalam memberdayakan industri rumah tangga diharapkan dapat mendukung serta meningkatkan pendapatan rumah tangga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Pendapat informan menyatakan bahwa industri rumah tangga (pisang sale) di Kecamatan Langkahan merupakan upaya warga masyarakat miskin sebagai langkah untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Menurut pendapat informan bahwa usaha industri rumah tangga pisang sale tersebut mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga, rata-rata dalam sebulan mencapai Rp.5.000.000-Rp.7.000.000. Walaupun tidak mencukupi, namun telah mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

Menurut pendapat informan bahwa pemerintah harus mengambil kebijakan berupa tindakan pemberdayaan industri rumah tangga (pisang sale), sehingga mampu menumbuhkan iklim usaha yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga bagi masyarakat miskin, sehingga hidupnya lebih berdaya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Wrihatnolo (2007) menyebutkan ciri-ciri individu warga masyarakat berdaya yaitu mampu memahami diri dan potensinya. Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan). Mampu mengarahkan dirinya sendiri. Memiliki kekuatan untuk memecahkan masalah. Memiliki kemampuan negoisasi yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan bertanggungjawab.

Adapun yang dimaksud dengan individu atau warga masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi.

4.2.2. Hambatan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Industri Rumah Tangga (Pisang Sale) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta pendapat para informan yang menyatakan hambatan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan industri rumah tangga pisang sale untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah, rendahnya kesadaran, minimnya pengetahuan (kemampuan dan keterampilan), terbatasnya modal kerja, minimnya aktivitas pemasaran serta terbatasnya bahan baku.

1. Rendahnya Kesadaran

Semua informan menyatakan bahwa rendahnya kesadaran menyebabkan individu dalam rumah tangga hidup malas tidak mau berusaha sehingga hidupnya tidak berdaya dan menjadi miskin. Hal ini merupakan sistim nilai yang buruk harus diberantas melalui peningkatan penyadaran agar mau bekerja dengan rajin sebagai langkah peningkatan pendapatan keluarga, sehingga mampu hidup secara mandiri, berkualitas dan bermartabat.

2. Minimnya Sumber Daya Manusia

Minimnya sumber daya manusia dalam pengelolaan menyebabkan industri rumah tangga (pisang sale) tidak mampu dikelola dengan baik. Oleh karena tahap transformasi sumber daya manusia merupakan langkah peningkatan kemampuan berupa wawasan, pengetahuan, kecakapan, ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

3. Terbatas Modal Kerja

Semua informan menyatakan bahwa yang menjadi hambatan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan industri rumah tangga di Kecamatan Langkahan adalah terbatasnya modal kerja. Hal ini penting mendapat perhatian Pemerintah Kecamatan Langkahan agar modal kerja menjadi fokus pemberdayaan industri rumah tangga, karena selama ini akses permodalan berupa dana dari perbankan, hasil perusahaan sebanyak 5% dan dana hibah kurang mendapat perhatian pemerintah.

Berdasarkan pengalaman dan kenyataan menunjukkan bahwa tanpa ada modal usaha maka perusahaan khususnya industri rumah tangga tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan pemerintah, yaitu mampu menumbuhkan kembangkan iklim perekonomian yang sehat dan dinamis sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

4. Rendah Kemampuan/Keterampilan

Hambatan yang dialami bagi 21 industri rumah tangga pisang sale di Kecamatan Langkahan adalah rendahnya kemampuan dan keterampilan. Hambatan tersebut merupakan hambatan yang menyangkut dengan aspek sumber daya manusia bagi pengelola industri rumah tangga. Tanpa sumber daya dan keterampilan yang handal dalam pengelolaan industri rumah tangga, maka tidak mampu menghasilkan produksi yang berkualitas.

5. Kurang Pemasaran.

Hambatan yang dialami secara umum dalam pembinaan industri rumah tanggapisang sale adalah kurangnya aktivitas pemasaran, baik yang dilakukan melalui pameran, keramaian dan pasar murah. Hal ini penting mendapat perhatian semua pihak sehingga produksi industri rumah tangga dapat diketahui dan mendapat perhatian masyarakat.

6. Terbatas Bahan Baku

Hambatan yang dialami dalam pemberdayaan industri rumah tangga adalah terbatasnya bahan baku (pisang), yang mengakibatkan produksi industri rumah tangga sering berhenti. Dalam keadaan tertentu bahan baku juga sering didatangkan dari kecamatan tetangga seperti Cot Girek, Panton Labu, Simpang Keuramat, Sawang, Nisam dan bahkan dari Bireuen.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa di Kecamatan Langkahan terdapat 21 Usaha industri rumah tangga (pisang sale) yang dikelola oleh keluarga miskin. Menurut analisa penulis bahwa industri rumah tangga pisang sale sangat bermanfaat bagi warga masyarakat Langkahan yang diperkirakan 35% hidup miskin. Oleh karena melalui usaha industri rumah tangga dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, sehingga warga miskin mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kecamatan Langkahan sebagai kecamatan yang penduduknya sebagian besar petani, maka industri rumah tangga pisang sale yang dikelola oleh keluarga miskin, yang ternyata sangat bermanfaat bagi keluarga miskin, sehingga mampu mendukung kehidupan warga masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-

hari dalam rumah tangga. Oleh karena itu diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kecamatan Langkahan dapat mengambil langkah kebijakan secara efektif, sehingga industri rumah tangga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat ahli Sulistyawati (2004) bahwa faktor yang menimbulkan hambatan dalam pemberdayaan adalah perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju. Pola pengaliran modal yang agak sulit dan Pola perdagangan didominasi oleh industri-industri di daerah yang lebih maju. Hal ini menyebabkan daerah miskin mengalami kesukaran untuk mengembangkan pasar hasil industrinya dan memperlambat perkembangan industri di daerah miskin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu serta pendapat yang disampaikan informan, maka pada bab ini diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan industri rumah tangga (pisang sale) diwujudkan melalui tindakan pemberian penyadaran individu keluarga miskin, pemberian kapasitas sumberdaya manusia (kemampuan, pengetahuan dan keterampilan), serta pemberian daya untuk fasilitasi dana untuk modal usaha. Kebijakan pemberdayaan tersebut sama sekali tidak pernah melakukan tindakan pemberdayaan bagi 21 industri rumah tangga, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan 35% penduduk Kecamatan Langkahan yang hidup dalam kondisi miskin.
2. Hambatan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan industri rumah tangga (pisang sale) di Kecamatan Langkahan adalah rendahnya kesadaran individu dalam rumah tangga, minimnya sumber daya manusia seperti pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, dan sulitnya memperoleh fasilitas dana sebagai modal kerja, serta kurangnya aktivitas pemasaran dan terbatasnya bahan baku.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Pemerintah dapat mengambil kebijakan pemberdayaan sebagai langkah yang tepat untuk membina industri rumah tangga (pisang sale) hendaknya diwujudkan secara efektif. Meningkatkan pemberdayaan dalam aspek pembinaan sumber daya manusia, fasilitasi dana/keuangan untuk modal usaha dan aktivitas pemasaran. Kebijakan pemberdayaan tersebut dapat dilakukan secara maksimal dan intensif (berkesinambungan) bagi 21 industri rumah tangga, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan 35% penduduk Kecamatan Langkahan yang hidup dalam kondisi miskin dapat hidup secara mandiri, berkualitas dan bermartabat.
2. Disarankan agar Pemerintah Kecamatan Langkahan melakukan pendekatan dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik, sehingga hambatan kebijakan pemerintah dalam pembinaan industri rumah tangga (pisang sale). Upaya yang diperlukan adalah melakukan motivasi sehingga menumbuhkan kesadaran agar mampu hidup mandiri, berkualitas dan bermartabat. Meningkatkan sumber daya manusia seperti peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, dan mempermudah memperoleh akses dana sebagai modal kerja (kredit perbankan, pinjaman non bank, pinjaman pihak ketiga, hasil keuntungan BUMN 5%, dana hibah serta meningkatkan akitivitas

pemasaran dan memperluas lahan perkebunan pisang sebagai bahan baku sehingga industri rumah tangga dapat berproduksi secara kontinyu.

REFERENSI

A. Buku-Buku

- Ahmad, Manzoer 2004, *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal*, Jakarta, Radjawali Press.
- Bappeda, Aceh Utra. 2015. *Aceh Utara Dalam Angka*, Lhokseumawe: Bappeda Aceh Utara.
- BPS, 2016. *Kecamatan Langkahan dalam Angka*, Langkahan: BPS Perwakilan Langkahan:
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Istiarti, et.a. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Undip Press.
- Juliantara, Dadang, 2000, *Arus Bawah Demokrasi dan Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: LAPERA.
- Lubis, Solly. 2004. *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Madju
- Moleong, Jexy.2001, *Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy (Kebijakan Publik)* Jakarta: PT Elex Media Komputerindo Kelompok Gramedia.
- Naihasyi, Syahrin. 2006. *Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Mafani*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Prijono, et.al, 2000, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta, *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*.
- Pujiwati, 2000. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Sulistiyawati, Ambar, Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sumaryati, Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Suryadi, A. 2000. *Pembangunan Masyarakat Desa*, Bandung: Alumni.
- Setyawati, Endarti 2003, *Responsivitas Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Publishing Company.

Wahab, Abdul, Sholichin. 2012. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi II. Jakarta: Bumi Aksara.

Wrihatnolo, Randy, 2007, *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, Gramedia.

B. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Muda, AK. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Royalti Publisher

Dwi Adi K, 2001, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Surabaya, Fajar Mulya.

C. Karya Tulis, Paper/Skripsi

Mohd. Iqbal (2013) “*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembinaan Home Industri Kuliner Kue Aceh di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen*”.

Murdani (2013) “*Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui home industri rumah tangga kue Aceh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat*” di Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur.

D. Peraturan dan Per Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, Tentang Usaha Kecil Menengah.

E. Sumber Lain

<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-enabling-empowering-and-protecting.html#more-90>. Diakses pada tanggal 22 april. 2017.

<http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/pemberdayaan-masyarakat-adat-dan-tantangannya.html>. Diakses pada tanggal 22 april 2017.

<http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html>. Diakses pada tanggal 2 April 2017.